

NASIONALISME DALAM PERUBAHAN DI INDONESIA :

Adaptasi atau Transplantasi

Sri Ana Handayani¹
srianahandayani@gmail.com

Abstract : Nationalism became a hot topic in Indonesia, in relation to events in the country related to *sara* issues. For that study relating to nationalism from a historical perspective is necessary. This study is a historical study, so the method used is the method of history. Historical methods have four stages of work, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The approach used semiotics that analyzes word usage. The conclusion of this study is that the growing nationalism of the movement is anti colonial nationalism. The nationalism that flourished during the Old Order was the unfinished nationalism of the revolution which eventually led to national and regional turmoil in Indonesia. Nationalism of the New Order era relates to the stability of state and nation security with xenophobic attitude, more towards state oriented compared to nation oriented. The era of reform, nationalism tends to be associated with the economic needs, namely the creative economy. Thus, nationalism in Indonesia experiences adaptation and change of meaning over time, from the symbol of resistance to a symbol of creative middle class growth.

Keywords : Nationalism; xenophobia; state oriented; nation oriented

Abstrak : Nasionalisme menjadi perbincangan yang hangat di Indonesia, sehubungan dengan berbagai kejadian di tanah air yang berkaitan dengan isu-isu sara. Untuk itu kajian yang berkaitan dengan nasionalisme dari perspektif histori sangat diperlukan. Kajian ini merupakan kajian sejarah, sehingga metode yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah memiliki empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan semiotika yang menganalisis penggunaan kata. Kesimpulan yang didapat dalam kajian ini adalah nasionalisme yang tumbuh masa pergerakan merupakan

¹ Dosen Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

nasionalisme anti penjajah. Nasionalisme yang berkembang masa Orde Lama adalah nasionalisme revolusi belum selesai yang pada akhirnya menimbulkan gejolak kebangsaan dan kedaerahan di Indonesia. Nasionalisme era Orde Baru berkaitan dengan stabilitas keamanan negara dan bangsa dengan sikap *xenophobia*, lebih kearah *state oriented* dibandingkan dengan *nation oriented*. Era reformasi, nasionalisme cenderung dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi, yaitu ekonomi kreatif. Dengan demikian, nasionalisme di Indonesia mengalami adaptasi dan perubahan makna dari waktu ke waktu, dari simbol perlawanan menjadi simbol pertumbuhan kelas menengah yang kreatif.

Kata Kunci : Nasionalisme; xenophobia; state oriented; nation oriented.

1 Pendahuluan

Sebagai negara kebangsaan, Indonesia mempunyai berbagai konsep yang berasal dari Barat. Istilah nasionalisme sendiri menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh karena memiliki akar yang panjang dalam perkembangan sejarah bernegara dan berbangsa bagi masyarakat Indonesia. Bagi bangsa Indonesia sendiri konsep nasionalisme baru dipelajari sekitar awal abad ke-20 oleh para tokoh pergerakan nasional.

Konsep-konsep Barat banyak digunakan di Indonesia, kemudian diadaptasikan dengan dengan pemahaman lokal, di satu sisi ada konsep yang berhasil diadaptasikan dan diterima, di sisi lain ada konsep yang diadaptasikan tetapi tidak dapat diterima, bahkan ada juga konsep Barat yang pada akhirnya justru dianggap sebagai hal yang ditabukan untuk dibicarakan di ranah politik bahkan sosial. Dennis Lombard mengatakan bahwa istilah nasionalisme merupakan salah konsep Barat yang dapat diterima dalam arti yang tepat oleh masyarakat Indonesia.²

Nasionalisme di Indonesia menarik untuk dikaji secara historis, karena dalam perjalanan waktu, istilah nasionalisme ini mengalami masa pasang surut dalam pengertian politik maupun sosial. Pemetaan pemahaman nasionalisme di wilayah Indonesia memerlukan keinginan politik dan sosial, karena hal ini akan menggambarkan seberapa besar hasrat bangsa Indonesia untuk beradaptasi dengan konsep nasionalisme ditengah gempuran ekonomi yang mengglobal.

² Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.167.

Paham negara kebangsaan di Eropa melalui proses yang panjang, diawali dengan masa renaissance sampai dengan masa pencerahan. Dalam proses pencerahan terjadi perubahan pemikiran yang melahirkan berbagai revolusi sosial, seperti yang terjadi di Perancis, dan Italia. Revolusi Perancis dipelopori dan dipimpin oleh kaum nasionalis.³ Kaum nasionalis menggulingkan kekuasaan monarki dengan memobilisasi masa dan menggunakan prinsip *egalite* (persamaan derajat), *liberte* (kebebasan), dan *fertinite* (persaudaraan). Ketiga slogan ini menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa mereka bersama-sama mempunyai hak yang sama atas negara serta mempunyai tanggung jawab yang sama pula.⁴

Latar belakang pertumbuhan pemahaman nasionalisme di Indonesia berbeda dengan negara-negara di Eropa, walaupun konsepnya sama akan tetapi nuansa nasionalisme dibalut dengan anti kolonialisme. Hal ini berkaitan dengan pengenalan konsep nasionalisme dalam era penjajahan Hindia Belanda.

Dewasa ini penjajahan asing tidaklah kentara secara nyata, akan tetapi merasuki seluruh kehidupan rakyat, baik dalam hal ideologi, sosial budaya, maupun ekonomi. Retorika nasionalisme sudah diganti oleh para politisi, pembisnis, dan bahkan cendekia dalam konteks yang berbeda dengan konsep nasionalisme awal kemerdekaan. Nasionalisme menjadi perbincangan hangat di antara mereka, bahkan nasionalisme diperbincangan lebih kepada *state oriented* daripada *nation oriented*. Dalam situasi inilah nasionalisme Indonesia menjadi topik yang memikat untuk diperbincangkan.

2 Metode Penelitian

Kajian Nasionalisme dalam perubahan di Indonesia: adaptasi atau transplantasi merupakan kajian sejarah. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat tahapan kerja, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.⁵

³ Sutarjo Adisusilo, *Sejarah Pemikiran Barat dari yang Klasik sampai Modern* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 114.

⁴ *Ibid.*

⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto* (Jakarta : Universitas Indonesia Press,1987), hlm, 32.

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

Heuristik merupakan tahapan pengumpulan sumber yang sesuai dengan tema. Sumber primer diperoleh dari dokumen dan koran sejamin (Kompas). Sumber sekunder berupa referensi kajian-kajian yang berkaitan dengan nasionalisme. Sumber primer dan sekunder didapatkan dari perpustakaan pribadi, ruang baca Jurusan Sejarah, dan ruang baca Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Tahapan kritik merupakan tahapan untuk menentukan orisinalitas dan otentitas dari sumber yang didapatkan oleh peneliti. Interpretasi merupakan analisis dari berbagai peristiwa berdasarkan sumber. Historiografi merupakan gambaran atau penuangan peristiwa dalam bentuk cerita.

Kajian yang berkaitan dengan nasionalisme menggunakan pendekatan semiotika. Semiotika diartikan menggambarkan dengan tanda, bahasa merupakan tanda yang mempunyai makna. Nasionalisme merupakan konsep yang abstrak, akan tetapi mempunyai makna tersendiri bagi orang-orang yang mengkajinya. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori semiotika dari Marcel Danesi yang mengatakan bahwa simbol mempunyai arti yang penting untuk mempresentasikan keseluruhan situasi. Pengetahuan untuk merepresentasikan situasi fisik dalam kehidupan secara simbolis adalah pencapaian benak manusia yang benar-benar luar biasa.⁶

3 Nasionalisme Era Pergerakan Nasional

Masa pergerakan nasional merupakan masa yang sangat krusial bagi masyarakat bumiputera, karena pada masa inilah bibit pemahaman berbangsa dan bernegara belum begitu banyak dipahami. Bumiputera sebagai warga yang terjajah hanya mempunyai prinsip bagaimana dapat bertahan hidup di negerinya sendiri. Kesenjangan budaya antara masyarakat yang menjajah dengan terjajah mengakibatkan perbedaan pandangan dalam memahami bernegara. Bernegara bagi bumiputera tidak terlepas dengan sistem kekuasaan feodalis yang memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang abstrak dan sarat dengan mitos, sementara pemerintah Hindia Belanda yang menjadi kolonialis menggunakan sistem bernegara

⁶ Marcel Danesi, *Pesan, Tanda, dan Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 130.

barat yang bersifat kongkrit.⁷ Realitanya, sistem pemerintahan Hindia Belanda di wilayah jajahannya menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat dualisme. Disatu sisi menerapkan sistem birokrasi modern yang diterapkan dalam sistem politik pemerintahan Hindia Belanda dan diterapkan bagi kepentingan orang-orang kulit putih yang berada di Hindia Belanda. Di sisi lain, pemerintah Hindia Belanda tetap menerapkan sistem pemerintahan lokal yang dianggap tradisional untuk kekuasaan dan kepentingan masyarakat bumiputera. Dalam perkembangannya pemerintahan Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan modern yang berbeda dengan negeri induknya.

Politik pemerintahan Hindia Belanda berubah sekitar tahun 1870-an, karena ada desakan dari para wirausahawan negeri Belanda yang menginginkan pihak swasta ikut serta mengelola kekayaan Hindia Belanda. Baru pada awal abad ke-20, sebagian politikus Belanda yang beraliran humanis memperhatikan kesejahteraan rakyat bumiputera yang dianggap jauh dari sejahtera kehidupannya. Sejalan dengan desakan yang kuat dari golongan ini, maka pemerintahan Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik Etik atau politik Balas Budi .

Pemerintah Hindia Belanda melaksanakan program politik etik atau balas budi. Program yang berkaitan dengan irigasi, edukasi, dan imigrasi merupakan program untuk meningkatkan taraf hidup bumiputera. Dari ketiga program yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, program pendidikan yang berjalan dengan cepat dan dapat diterima oleh masyarakat bumiputera. Sentuh budaya cara berpikir orang Barat dengan pendidikan bumiputera, membuka cakrawala baru tentang dunia yang mengglobal pada waktu itu. Banyak hal-hal baru yang dapat dipelajari melalui pendidikan, masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan dapat mempelajari buku-buku yang sudah dicetak dalam huruf latin dan menggunakan bahasa yang sekarang dapat dipahami. Cakrawala baru inilah yang menentukan perubahan berpikir segelintir masyarakat bumiputera untuk memahami arti kemerdekaan sebagai suatu bangsa.

⁷ Mengenai kekuasaan orang Jawa lihat lebih jauh tulisan dari Benedict Anderson R. O'G., "The Idea of Power in Javanese Culture", in Claire Holt (penyunting), *Culture and Politics In Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press).

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

Pendidikan modern telah melahirkan *homines novi* (orang baru), kaum ini berhasil menaikkan status sosial dan prestise sosialnya. Golongan inilah yang memegang peralihan penting dalam masa pergerakan nasional di Indonesia⁸. Bumiputera yang telah mengenyam pendidikan dan masuk ke dalam golongan terpelajar secara perlahan mulai mengenal bahasa di luar bahasa daerahnya terutama bahasa asing Eropa (Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, dan sebagainya). Cukup menarik untuk dikaji mengenai kosa kata dan konsep *nation* dan *nationalism*. Bahasan tentang bangsa (*nation*) inilah yang pada akhirnya dapat mengerahkan masyarakat dan menghimpun legitimasi bagi sebuah perjuangan kemerdekaan dengan mengatas namakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pelajar yang terpelajar, tetapi bagi kepentingan seluruh bumiputera, baik yang terpelajar maupun yang belum terpelajar.

Kosa kata seperti nasionalisme, Indonesia, merdeka, dan sebagainya pada awalnya lebih banyak diserap dan digunakan oleh bumiputera (berasal dari berbagai daerah Hindia Belanda) yang belajar di negeri Belanda. Para pelajar yang berada di Belanda mendirikan perkumpulan pelajar dengan nama *Indische Vereniging* (Perhimpunan Hindia) pada tahun 1908.⁹ Sementara di Hindia Belanda sendiri, baru segelintir orang yang mengenyam pendidikan modern yang sadar akan kedudukannya sebagai bangsa yang dijajah. Untuk itu sebagian orang inilah yang mulai memikirkan kosa kata yang mengenakan untuk perjuangannya dikelak kemudian hari, salah satunya adalah Soekarno.

Bahasa daerah yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari tidak memungkinkan adanya satu pemikiran akan suatu konsep baru dari Barat, dan hal ini yang cukup menyulitkan bagi perkembangan pemahaman baru yang abstrak dalam perbedaan bahasa bumiputera. Momentum yang sangat berharga adalah pada saat para pemuda menyatakan kebersamaan dalam forum pertemuan organisasi pemuda

⁸ Sartono Kartodirdjo, "Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial", dalam *Lembaran Sedjarah*, No 4, Desember 1969 (Yogyakarta: Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, 1969), hlm.55.

⁹ Akira Nagazumi, "Masa Awal Pembentukan Perhimpunan Indonesia" Kegiatan Mahasiswa Indonesiadi Negeri Belanda", dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 136.

yang mengeluarkan sumpah kebersamaan dalam perjuangan, yaitu Sumpah Pemuda. Momentum kebersamaan inilah yang pada dasarnya mempermudah membumikan kosa kata Barat, salah satunya tentang kosa kata nasionalisme. Nasionalisme ini dipahami sebagai cinta tanah air dan terbebas dari kekuasaan asing.¹⁰

Nasionalisme yang lahir masa pergerakan nasional ini melahirkan arti untuk berbangsa dan bernegara yang merdeka dari kekuasaan Hindia Belanda. Dengan demikian, lahir berbagai pergerakan berdasarkan agama, ideologi, golongan, dan sebagainya yang pada intinya ingin melepaskan diri dari belenggu penjajahan Hindia Belanda. Keberhasilan bangsa Indonesia membentuk negara kebangsaan melalui tokoh proklamator Soekarno-Hatta dengan cara menyatakan diri sebagai bangsa yang merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nasionalisme kemerdekaan terbentuk seperti yang dipahami dalam konteks positivis, yaitu perasaan yang sangat mendalam dan kesetiaan individu hanya untuk negara kebangsaan, nasionalisme ini merujuk kepada pengertian keyakinan sekelompok orang mengenai bangsa.¹¹

4 Era Orde Lama

Bangsa Indonesia memasuki babakan baru dalam kehidupan bernegara dan berbangsa pada masa revolusi fisik. Pada masa ini, berbagai rintangan datang, baik dari pihak bangsa asing maupun bangsa Indonesia sendiri. Indonesia yang baru merdeka berusaha untuk berdiri dan mempertahankan keinginan untuk tidak dikuasai oleh bangsa asing. Jargon-jargon politik mulai tumbuh untuk mengubah mentalitas bangsa Indonesia agar bertahan dalam berbagai kesulitan. Revolusi mulai didengungkan, dan dipahami rakyat sebagai perlawanan terhadap penjajahan asing. Revolusi dan nasionalisme saling bergema untuk mengobarkan semangat mempertahankan dan meraih kembali kebebasan bernegara oleh bangsa sendiri. Pada akhirnya tahun 1950-an, Indonesia berhasil keluar dari kemelut perjuangan bangsa dengan bangsa asing, dan berhasil menyatakan bangsa dalam pilar besar dengan jargon revolusi.

¹⁰ Dennys Lombard, *op. cit.*, hlm. 168.

¹¹ Untuk lebih jelas, lihat uraian mengenai nasionalisme dari Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya* (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1979).

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

Dalam perjalanan waktu, terjadi perpecahan politik antara Soekarno-Hatta, karena adanya perbedaan pandangan dalam membangun bangsa. Hatta yang lebih tenang menginginkan pendidikan politik bagi masyarakat secara bertahap, dan membangun ekonomi rakyat melalui pinjaman yang terbatas. Di Sisi Lain, Soekarno menggunakan slogan revolusi belum selesai, jadi pada intinya nasionalisme tetap memerangi kolonialisme, liberalisme, dan dan imperialisme. Tanggal 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden, karena pandangan membangun bangsa di antara keduanya semakin berbeda, bahkan Hatta merasa bahwa Soekarno sudah menjurus ke arah penguasa tunggal.¹²

Bangsa Indonesia yang masih terbuai dengan pemerintahan sendiri, pada awal Orde Lama lebih memahami revolusi belum selesai, sehingga yang ada di dalam benaknya adalah melenyapkan kolonialisme dan imperialisme asing dalam hal ini Amerika dan Eropa. Kebijakan pemerintah lebih kepada kebijakan politik memusuhi dua kekuatan asing ini. Pada masa pemerintahan Orde Lama lahir apa yang dinamakan NASAKOM (Nasional, Agama, dan Komunis), tiga pilar kekuatan yang dapat menyatukan bangsa dan menangkalkan pengaruh imperialisme Barat. Bahkan, pendapat Soekarno tentang revolusi belum selesai menyeret Indonesia ke dalam kancah peperangan dengan Malaysia yang dianggap sebagai bagian dari imperialisme Inggris.

Slogan evolusi belum selesai yang dibangun adalah politik idologi, yang mengarah kepada demokrasi terpimpin. Demokrasi Barat yang dipadukan dengan feodalisme timur. Beragam pendapat tentang konsep demokrasi terpimpin tidak menyelesaikan permasalahan mendasar lainnya, yaitu kehidupan ekonomi bangsa. Aspek ekonomi terpinggirkan dalam perjalanan amanah Undang-Undang Dasar 1945. Aspek ekonomi melalui revolusi Banteng, berdiri di atas kaki sendiri, dan mengurangi peran orang China yang terkenal dengan Ali-Baba tidak terlealisasi. Bahkan, bangsa Indonesia terjerat dalam inflasi yang sangat tinggi. Pasang surut kekuasaan Orde Lama membawa bangsa Indonesia kepada kemiskinan, karena kondisi ekonomi dan politik yang tidak kondusif, mengakibatkan demonstrasi besar-

¹² Deliar Noor, *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2012), hlm.148-149.

besaran dari anak bangsa, terutama dari golongan mahasiswa. Demonstrasi yang menuntut perbaikan ekonomi, sosial, dan politik.

Konsep nasionalisme yang dikaitkan dengan revolusi belum selesai mengalami pergeseran makna. Hal ini karena kondisi ekonomi dan politik dalam negeri tidak terkontrol secara seimbang. Tantangan semakin besar, karena bukan masalah imperialisme dan kolonialisme semata, tetapi juga masalah ideologi lain yaitu komunisme yang dianggap juga merongrong kewibawaan pemerintah. Kondisi ekonomi yang semakin buruk dan pertentangan ideologi yang semakin kompleks, menyeret bangsa Indonesia dalam tragedi yang dikenal sebagai tragedi gerakan 30 September tahun 1965. Tragedi inilah yang mengakhiri kekuasaan dan kekuatan Orde Lama, dan melahirkan pemerintah yang baru yang di kemudian hari dikenal sebagai Orde Baru.

5 Nasionalisme Era Orde Baru

Orde Baru dibangun di atas luka bangsa karena adanya pertentangan ideologi yang hampir memporakporandakan bangsa. Pertentangan ideologi yang keras, pada akhirnya melumpuhkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi permasalahan bangsa yang kompleks, maka Orde Baru berusaha untuk merajut persatuan bangsa. Salah satu dari kebijakannya adalah tidak memperbolehkan ideologi komunis berkembang di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru berusaha untuk memperbaiki dan menegakkan kembali kewibawaan negara dan bangsa melalui pembangunan yang dikenal dengan modernisasi. Konsep revolusi belum selesai diubah dengan konsep pembangunan. Pembangunan ini bertahap yang dikenal dengan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Tujuan pembangunan mengubah masyarakat dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Pembangunan menjadi gaung yang sangat intens dalam mengubah masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang modern.

Pembangunan sebuah bangsa berkaitan dengan nasionalisme dan ketahanan negara sebagai negara bangsa (*nation state*), yang memiliki kedaulatan atas atas

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

wilayah yang menjadi miliknya.¹³ Untuk membangun bangsa, maka pemerintah Orde Baru membuat suatu kebijakan yang bersifat sentralistik. Hal ini terjadi karena ada faktor yang melatarbelakanginya, antara lain:

1. Adanya kekhawatiran terhadap persatuan nasional dan munculnya kekuatan yang memecah persatuan.
2. Sentralisasi diperlukan dalam rangka memelihara keseimbangan politik dan keamanan dalam pembagian sumber daya, khususnya antara Jawa yang dihuni oleh sebagian besar rakyat Indonesia dan luar Jawa yang memiliki sebagian besar sumber ekonomi.
3. Pengalaman politik yang dialami Indonesia sekitar tahun 1965, sehingga pemerintah ingin tetap memegang kendali kebijaksanaan ekonomi.

Masa pemerintahan Orde Baru, menggulirkan ideologi pembangunan atau *developmentalism* melalui pelaksanaan berbagai program modernisasi dan industrialisasi.¹⁴ Bersamaan dengan penerapan program pembangunan, persoalan nasionalisme tetap menjadi milik elite yang cenderung dikaitkan dengan ketahanan negara. Secara ekonomi, bangsa Indonesia mengalami perbaikan dibandingkan masa Orde Lama. Akan tetapi, keberhasilan ekonomi tidak diimbangi dengan kebebasan berpendapat atau menyatakan pendapat.

Pemerintah, dalam berbagai kebijakan baik dibidang politik, sosial, maupun ekonomi dibuat cenderung dalam rangka memperkokoh integrasi kekuasaan elite penguasa yang justru memperkokoh semua unsur otoriter Orde Baru daripada suatu integrasi nasional. Stabilitas politik cenderung mengarah kepada stabilitas kekuasaan tanpa memikirkan stabilitas pemerintahan, sementara pertumbuhan ekonomi hanya

¹³ Riwanto Tirtosudarmo, "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya : Beberapa Catatan dari Prspektif Demografis", dalam Thum Ju Land an M'Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya* (Jakarta: LIPI bekerja sama dengan Yayasan Obor, 2011), hlm. 22.

¹⁴ M'Azzam Manam dan Thung Ju Lan, "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia sebagai Sebuah Problem Kontemporer", dalam Thum Ju Land an M'Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya* (Jakarta: LIPI bekerja sama dengan Yayasan Obor, 2011), hlm. 11.

dapat dinikmati oleh penguasa, segelintir elite birokrat, serta para pengusaha yang dekat dengan kekuasaan.¹⁵

Pembangunan politik cenderung dimaknai sepihak oleh pemerintah. Kebijakan yang diterapkan secara sentralistik di bidang ekonomi dan politik di seluruh Indonesia dengan pendekatan modern, telah melumpuhkan berbagai kearifan lokal yang dapat menunjang pembangunan itu sendiri. Di samping itu, kebijakan yang seragam ditunjang dengan pendekatan keamanan yang represif, menindas, dan menafikan aspirasi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik sangat kuat, hampir tidak ada ruang yang menyediakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat (aspirasi dari bawah). Pemerintah Orde Baru menerapkan strategi ganda disatu sisi koorporatisme negara, di sisi lain depolitisasi massa.

Pembangunan ekonomi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat belum tercapai seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena kebijakan ekonomi yang mengolah kekayaan sumber daya alam daerah belum diimbangi dengan hasil bagi yang proposial dan adil dengan daerah bersangkutan. Pada dasarnya secara makro perkembangan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru relative tinggi. Akan tetapi, karena tidak imbang dalam pembagian produknya telah menimbulkan ketimpangan pembangunan itu sendiri. Hasil dari pembangunan ekonomi hanya dapat dirasakan oleh segelintir masyarakat yang erat dengan kekuasaan, birokrasi, serta pengusaha yang dekat dengan penguasa.

Hegemoni pemerintah terhadap kehidupan politik masyarakat sangat kuat, sehingga nasionalisme yang terbentuk menjadi *state-oriented* bukan *nation-oriented*. Rasa kebangsaan dipupuk melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Program ini, diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia sejak seseorang duduk sebagai siswa sekolah menengah. Kesetiaan seseorang terhadap negara bangsa harus ditunjukkan kepada pemimpin tanpa membantah.

Di bidang sosial budaya terjadi pergeseran pengertian gotong royong dan azas kekeluargaan, di mana dalam birokrasi dan partai politik azas kekeluargaan berubah menjadi keluarga sendiri yang berkuasa, demikian juga yang lainnya.

¹⁵Syamsudin Haris, "Nasionalisme Indonesia dan Keberagaman Budaya dalam Perspektif Politik", dalam Thum Ju Land an M'Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya* (Jakarta: LIPI bekerja sama dengan Yayasan Obor, 2011), hlm. 53.

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

Neologisme azas yang mengandung kearifan lokal sangat berkurang. Bangsa yang menginginkan kebebasan berpendapat tidak tersalurkan, karena dibatasi oleh berbagai peraturan sepihak. Selain itu, tingkat korupsi yang tinggi di kalangan pejabat tinggi semakin tidak tersentuh oleh hukum, karena aspek kekeluargaan dan *eweh pakewuh*.

Akan tetapi, di sisi lain nasionalisme terhadap bangsa sendiri dipupuk melalui cara lain, seperti melalui anjuran dari atas (menteri), musik, dan budaya. Sekitar awal tahun 1980-an, menteri perindustrian yang dijabat oleh Jendral M. Yusuf menggiatkan cintailah produk dalam negeri. slogan cintailah produk-produk Indonesia, yaitu membangkitkan rasa nasionalisme terhadap produk bangsa sendiri. Hal ini berjalan karena bangsa Indonesia diserbu oleh produksi dari luar, bangsa Indonesia merasa bergengsi tinggi apabila menggunakan produk dari luar. Dengan adanya slogan mencintai produk sendiri, diharapkan masyarakat akan membeli hasil karya anak bangsa yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian pengrajin lokal khususnya. Bahkan, salah satu group band terkenal dari Bandung, yaitu Bimbo mengeluarkan lagu yang berkaitan dengan nasionalisme yaitu cintailah produk Indonesia melalui lagu Aku Cinta Buatan Indonesia. Semangat nasionalisme bukan hanya di bidang politik saja, melainkan juga melalui teater, musik, dan budaya lainnya.

Nasionalisme era Orde Baru yang cenderung kearah *state oriented*, tidak memberikan ruang yang bebas untuk kebebasan berpendapat karena Negara memegang Kontrol utama. Nasionalisme lebih diarahkan kepada kepatuhan terhadap pejabat, birokrat, dan unsur atasan dengan alasan untuk keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam rentang waktu sekitar 30 tahun Orde Baru berkuasa tumbuh dengan subur korupsi, nepotisme, belenggu kebebasan berpendapat, dan kesenjangan sosial yang semakin lebar menumbuhkan rasa ketidakpuasan sebagian besar masyarakat Indonesia yang memahami cara berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hegemoni pemerintah disegala bidang melahirkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakpatuhan terutama dari golongan generasi muda

terhadap pemerintah Orde Baru, karena ruang demokrasi semakin terbatas, eksplorasi rasa kebangsaan menjadi sangat berkurang.

Pada tahun 1998, pemerintah Indonesia tidak dapat mengelak dari krisis moneter yang mengglobal. Krisis ini melumpuhkan sendi perekonomian pemerintah Indonesia yang berimbas pada tingkat inflansi yang sangat tinggi. Rakyat yang merasa tidak puas dengan belenggu kebebasan secara politik, didera dengan kondisi ekonomi yang menurun dratis, mengakibatkan demonstrasi nasional dari seluruh golongan atau lapisan masyarakat yang dimotori oleh mahasiswa. Demonstrasi nasional berhasil menggantikan sistem Orde Baru dengan Orde Reformasi. Bagaimana nasionalisme dipahami oleh bangsa yang berusaha untuk eksis di tengah gempuran krisis yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi yang telah dibangun sekitar tiga puluh tahun oleh pemerintahan Orde Baru.

6 Nasionalisme Era Reformasi

Euforia masyarakat atas keberhasilan mengganti sistem pemerintahan Orde Baru membuat semangat reformasi diwarnai dengan berbagai tuntutan pada saat demonstrasi. Sistem pemerintahan dibenahi disesuaikan dengan pergerakan zaman. Gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa mengagendakan enam tujuan utama, yaitu (1) adili Suharto dan kroni-kroninya, (2) Laksanakan amandemen UUD 1945, (3) hapuskan Dwi Fungsi ABRI, (4) Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, (5) tegakkan supermasi hukum, dan (6) ciptakan supermasi hukum. Dalam proses perjalanan berbangsa dan bernegara, tidak semua tuntutan gerakan Reformasi terpenuhi. Akan tetapi, bagaimana dengan perasaan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara yang terbungkus dalam nasionalisme?

Nasionalisme harus diletakkan dalam konteks zaman. Nasionalisme era reformasi menghadapi tantangan yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya, di mana permasalahan yang dihadapi negara semakin kompleks. Terlebih zaman sekarang adalah zaman teknologi gawai yang menciutkan dunia dalam sebuah dunia maya. Berita yang mudah diakses, pertemanan yang semakin maya, berita-berita yang mudah diakses, sistem ekonomi melalui daring yang semakin membumi mengharuskan masyarakat Indonesia harus melek teknologi. Generasi muda

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

Indonesia dewasa ini, berpotensi mengalami pergeseran dalam konsep dirinya mengenai komunitas imajiner. Ketika koneksitas teknis semakin kuat, maka ada kecenderungan konektivitas dalam rasa dan kebangsaan akan merenggang. Kemajuan teknologi dunia harus diimbangi oleh nasionalisme, agar tidak terjebak dalam kelunturan nasionalisme itu sendiri.

Bagaimana generasi muda di Indonesia pada tahun 1928 mampu menciptakan sistem keyakinan dan simbol dalam pertautan akar-akar sosiokultural yang melintas batas keetnis, geopolitik, geografi, bahasa yang membuka wawasan bangsa menuju pembentukan nasionalisme kewargaan yang luas dan inklusif.¹⁶ Akan tetapi, tantangan masyarakat Indonesia dalam membentuk nasionalisme era reformasi berbeda dengan masa generasi sebelumnya, karena tantangan yang dihadapi berkaitan dengan tarikan global kearah demokrasi di tengah gempuran teknologi canggih yang semakin mengglobal.

Di tengah situasi yang semakin kompleks, masyarakat Indonesia harus dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam membangun bangsa dan Negara. Tantangan demokrasi ke depan adalah bagaimana mewujudkan pengakuan politik dan politik pengakuan yang menjamin hak individu maupun kesetaraan hak atas aneka kelompok budaya sehingga dapat berdampingann secara damai dan produktif dalam republik Indonesia.

Pemerintah dewasa ini mencanangkan *nawa cita* untuk merevolusi mental bangsa Indonesia, tujuannya agar dapat mengikuti arus zaman tanpa tenggelam dalam kekuatan asing dunia. Rencana yang sudah diatur dalam instruksi presiden tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental dalam lima program yang harus digalakkan, yaitu:

1. Gerakan Indonesia melayani
2. Gerakan Indonesia bersih
3. Gerakan Indonesia tertib
4. Gerakan Indonesia mandiri
5. Gerakan Indonesia bersatu

¹⁶ Yudi Latif, “Respons Idealisme Muda”, dalam *Kompas* Sabtu 28 Oktober 2017, hlm. 6.

Tujuan dari *nawa cita* ini adalah mengubah dan memperbaiki karakter bangsa, sasaran utamanya adalah sumber daya manusia yang andal sejak dini dalam rangka memperkuat daya saing bangsa. Adapun tujuan utamanya adalah mengikis habis budaya birokrasi yang malas, budaya priyayi yang selalu ingin dilayani, budaya korupsi, budaya disiplin, budaya kreatif, dan sebagainya.¹⁷

Dunia sedang mengalami proses globalisasi yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu melampaui batas ruang dan waktu. Dalam proses globalisasi, ekonomi pasar akan mempengaruhi negara bangsa di dunia, Ekonomi pasar akan mempengaruhi Indonesia secara nyata, maka dalam tataran tertentu, ekonomi global dapat menghancurkan atau sebaliknya dapat menumbuhkan ekonomi suatu negara bangsa, dalam arti bahwa ekonomi global atau pasar dapat mempengaruhi segi ekonomi, politik, maupun masyarakat suatu bangsa yang dapat saja menjadi suatu ancaman negara bangsa yang tidak siap menerima perubahan ekonomi pasar yang sudah mengglobal. Di sisi lain, tantangan bangsa Indonesia, bagaimana membentuk nasionalisme yang dapat mengimbangi bahkan mengguli kekuatan bangsa lain.

Kemampuan negara dan pemerintah dalam merawat, mengelola, dan terus memperbarui nasionalisme sebagaimana imajinasi para pendahulunya sebagai pendiri bangsa di wilayah Nusantara, tampaknya akan menjadi faktor kunci ke arah mana bangsa Indonesia akan menuju. Yudi Latif mengatakan bahwa dalam wawasan Pancasila, kesadaran nasionalisme itu mengandung nilai-nilai emansipatori.¹⁸ Sumber penindasan dapat datang dari homogenitas globalisasi maupun dari partikularisasi lokalisme. Nasionalisme diharapkan dapat menjembatani perbedaan ini. Diharapkan rasa kebangsaan Indonesia dengan dipandu nilai-nilai Pancasila dapat mengantisipasi tantangan yang harus dihadapi dengan jalan menawarkan visi global tanpa meninggalkan kearifan lokal.

7 Kesimpulan

¹⁷ Abdillah Toha, "Apa Kabar Revolusi Mental Jokowi?", dalam *Kompas*, Selasa 28 Nopember 2017, hlm. 6.

¹⁸ Yudi Latif, *op. cit.*

Nasionalisme Dalam Perubahan di Indonesia: Adaptasi atau Transplantasi (Sri Ana Handayani)

Nasionalisme dipinjam dari bahasa asing, akan tetapi dalam berkembangannya pengertian nasionalisme menjadi membumi karena beberapa tokoh pergerakan berhasil memberi arti nasionalisme yang mengakar dengan tradisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Nasionalisme mengalami neologisme dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Pemahaman nasionalisme di Indonesia dari waktu ke waktu berubah, sesuai dengan jiwa zamannya. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme dipahami sebagai lawan dari kolonialisme dan imperialisme yang pada waktu itu sedang merajai di belahan dunia Timur.

Masa kemerdekaan pun, konsep nasionalisme mengalami perubahan makna dari yang asli. Masa Orde Lama nasionalisme lebih menekankan kepada pengertian evolusi belum selesai yang berkaitan dengan tumbuhnya demokrasi terpimpin atau ke arah penguasaan tunggal. Pada masa orde baru di mana konsep nasionalisme untuk membangun bangsa itu lebih menekankan kepada stabilitas politik bangsa Indonesia, yang sangat tidak menghendaki komunisme. Nasionalisme yang lahir lebih bersifat kepada ideologi negara, di samping untuk membangun ekonomi bangsa menuju kesejahteraan masyarakat. Era reformasi nasionalisme ditujukan untuk memujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam *nawa cita*. Berbagai aspek nasionalisme dikaitkan dengan kecintaan terhadap Negara. Nasionalisme dewasa ini adalah nasionalisme yang dapat memadukan pengaruh global tanpa meninggalkan kearifan lokal.

DAFTAR ACUAN

- Adisusilo, Sutarjo. *Sejarah Pemikiran Barat dari yang Klasik sampai Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Anderson R. O'G. Benedict. "The Idea of Power in Javanese Culture", in Claire Holt (penyunting), *Culture and Politics In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1986.
- Danesi, Marcel. *Pesan, Tanda, dan Makna*. Yogyakarta : Jalasutra, 2004.

- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1987.
- Kartodirdjo, Sartono. “Struktur Sosial dari Masyarakat Tradisional dan Kolonial”, dalam *Lembaran Sedjarah*, No 4, Desember 1969. Yogyakarta : Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudajaan Universitas Gadjah Mada, 1969.
- Kohn, Hans. *Nasionalisme Arti dan Sejarah*. Jakarta: P.T. Pembangunan, 1979.
- Latif, Yudi “ Respons Idealisme Muda”, dalam *Kompas*, Sabtu 28 Oktober 2017.
- Lombard, Lombard. *Nusa Jawa: Silang Budaya Batas-Batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Manam ,M’Azzam dan Thung Ju Lan. “Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia sebagai Sebuah Problem Kontemporer”. Dalam Thum Ju Land an M’Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya*. Jakarta: LIPI bekerja sama dengan Yayasan Obor, 2011.
- Nagazumi, Akira “Masa Awal Pembentukan Perhimpunan Indonesia” Kegiatan Mahasiswa Indonesiadi Negeri Belanda”, dalam Akira Nagazumi, *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1986.
- Noor, Deliar. *Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa*. Jakarta : Kompas, 2012.
- Tirtosudarmo, Riwanto. ”Nasionalisme dan Ketahanan Budaya : Beberapa Catatan dari Prspektif Demografis” dalam Thum Ju Land an M’Azzam Manam, *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya*. Jakarta: LIPI bekerja sama dengan Yayasan Obor, 2011.
- Toha, Abdillah. ”Apa Kabar Revolusi Mental Jokowi ?” dalam *Kompas*, Selasa 28 Nopember 2017.